



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengamanan baik terhadap individu dan/atau barang milik negara serta optimalisasi pelaksanaan tugas operasional yang bersifat rahasia, diperlukan adanya suatu sarana berupa kendaraan bermotor yang dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus dan rahasia;
 - b. bahwa penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersifat khusus dan rahasia baik yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun instansi lain, dilaksanakan melalui prosedur registrasi dan identifikasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia bagi Kendaraan Bermotor Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintahan adalah Instansi Pemerintahan yang meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada di pusat dan daerah.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara.
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

7. Tanda.....

7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu.
8. STNK Rahasia adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor Pejabat/Petugas yang bertugas di bidang Intelijen dan/atau penyidik dalam rangka menjaga/menjamin kerahasiaan identitas baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan.
9. STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya dalam rangka menjamin/memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan.
10. TNKB Rahasia adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi dan huruf seri tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Polda dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor yang digunakan petugas intelijen dan penyidik Polri.
11. TNKB Khusus adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi khusus yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor dinas yang digunakan pejabat pemerintah.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini yaitu terselenggaranya tata cara penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan demi terwujudnya keamanan dan kerahasiaan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia, meliputi:

- a. sederhana, yaitu prosedur pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia mudah dipahami dan dilaksanakan;
- b. cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia;
- c. transparan, yaitu prosedur dan persyaratan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dilaksanakan secara terbuka;
- d. akuntabel, yaitu dalam melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. selektif, yaitu penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia hanya diberikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan kekhususan tugas dan jabatannya.

BAB.....

BAB II**JENIS STNK/TNKB****Pasal 4**

- (1) Jenis STNK/TNKB yang dikeluarkan oleh Polri terdiri dari:
 - a. STNK/TNKB khusus; dan
 - b. STNK/TNKB rahasia.
- (2) STNK/TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan untuk mendukung kepentingan pengamanan pejabat tertentu dan/atau pelaksanaan tugas operasional intelijen dan penyidikan/penyelidikan

Pasal 5

- (1) STNK/TNKB khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh pejabat:
 - a. TNI;
 - b. Polri; dan
 - c. Instansi Pemerintahan.
- (2) STNK/TNKB khusus bagi kendaraan bermotor dinas Pejabat TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan dapat diberikan kepada:
 - a. eselon I;
 - b. eselon II; dan
 - c. eselon III.

Pasal 6

- (1) STNK/TNKB rahasia diberikan bagi kendaraan bermotor dinas dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan kerahasiaan identitas kendaraan bermotor dan pengguna.
- (2) STNK/TNKB rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan untuk kendaraan bermotor dinas yang digunakan oleh petugas:
 - a. Intelijen TNI;
 - b. Intelijen Polri;
 - c. Intelijen Kejaksaan;
 - d. Badan Intelijen Negara; dan
 - e. Penyidik/Penyelidik.

Pasal.....

Pasal 7

- (1) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas di lingkungan Polri berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Propam.
- (2) STNK/TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh fungsi Intelkam.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan untuk setiap permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia.
- (4) Daftar pejabat/petugas di lingkungan Polri dan pejabat/petugas dari TNI dan Instansi Pemerintahan yang diberikan STNK/TNKB khusus dan rahasia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III**PERSYARATAN, PROSEDUR, DAN KEBERLAKUAN****Bagian Kesatu
Persyaratan****Pasal 8**

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus sebagai berikut:

- a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas;
- b. STNK Dinas yang berlaku;
- c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan;
- d. fotokopi keputusan jabatan pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;
- e. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas;
- f. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan
- g. STNK khusus yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB khusus.

Pasal.....

Pasal 9

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB rahasia sebagai berikut:

- a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas;
- b. STNK Dinas yang berlaku;
- c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan;
- d. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas operasional;
- e. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan
- f. STNK rahasia yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB rahasia.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 10

Penerbitan surat rekomendasi permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan;
- b. pelaksanaan verifikasi, meliputi kegiatan:
 1. penelitian kelengkapan persyaratan;
 2. pemeriksaan silang (*crosscheck*) keabsahan persyaratan;
 3. penelitian kesesuaian antar dokumen; dan
 4. penelitian kesesuaian dokumen dengan hasil cek fisik kendaraan;
- c. pendataan dan dokumentasi, meliputi kegiatan:
 1. pencatatan dalam buku register; dan
 2. entry data pada sistem komputer;
- d. penerbitan dan registrasi rekomendasi; dan
- e. penyerahan rekomendasi dan persyaratan administrasi kepada pemohon untuk proses penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia kepada Dirlantas Polda.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan Polri diajukan kepada:
 - a. Kepala Divisi Propam (Kadivpropam) Polri u.p. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Bidang Propam (Kabidpropam) Polda untuk tingkat Polda.

- (2) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan TNI dan Instansi Pemerintahan diajukan kepada:
 - a. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri u.p. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) untuk tingkat pusat; dan
 - b. Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari Polri dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan (Kabagbinpam) Ropaminal Divpropam Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Subbidang Pengamanan Internal (Kasubbidpaminal) Bidpropam Polda pada tingkat Polda.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari TNI dan Instansi Pemerintahan dilakukan oleh:
 - a. Kasiyanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat; dan
 - b. Kasiyanmin Ditintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 13

Pendataan dan dokumentasi, penerbitan dan registrasi rekomendasi, serta penyerahan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh petugas pelayanan pada:

- a. Baintelkam Polri dan Divpropam Polri untuk tingkat pusat; atau
- b. Ditintelkam Polda dan Bidpropam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal.....

Pasal 14

Dalam hal pemohon tidak melengkapi atau memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang wajib menolak permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia.

Pasal 15

- (1) Pemohon wajib menjaga agar STNK/TNKB khusus dan rahasia yang telah diberikan tidak disalahgunakan atau dipindahtanggankan kepada orang yang tidak berhak/berwenang.
- (2) Dalam hal STNK/TNKB khusus dan rahasia disalahgunakan, pejabat penerbit rekomendasi berwenang mencabut dan membatalkan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Bagian Ketiga Keberlakuan

Pasal 16

- (1) STNK/TNKB khusus dan rahasia berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. telah melewati masa berlaku 1 (satu) tahun dan tidak diperbaharui kembali;
 - b. kendaraan bermotor dinas yang digunakan telah dihapus oleh instansi yang bersangkutan; atau
 - c. kendaraan bermotor dinas dipindahtanggankan atau dipindahkan ke satker/dinas lain.

Pasal 17

- (1) Dalam hal STNK khusus dan rahasia hilang sebelum habis masa berlakunya, pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas tersebut wajib:
 - a. melaporkan kepada Kantor Kepolisian setempat; dan
 - b. menyampaikan laporan kehilangan tersebut kepada pejabat yang mengeluarkan rekomendasi.
- (2) Pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas dapat mengajukan kembali rekomendasi permohonan penerbitan STNK khusus dan rahasia sesuai persyaratan.

BAB.....

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas Polri dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Polri.

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:

- a. audit/pemeriksaan;
- b. reviu;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan;
- e. pembatasan akses;
- f. dokumentasi; dan
- g. kegiatan pengawasan lain.

Pasal 20

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia untuk kendaraan bermotor dinas Polri, sebagai berikut:

- a. Karopaminal Divpropam Polri untuk lingkungan Satker Mabes Polri; dan
- b. Kabidpropam Polda untuk lingkungan Satker Polda.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menandatangani surat rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia untuk kendaraan bermotor dinas TNI dan Instansi Pemerintahan, sebagai berikut:

- a. Dirintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat; dan
- b. Dirintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menerbitkan STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagai berikut:

- a. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda Metro Jaya; dan
- b. Dirlantas Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda masing-masing.

BAB.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/136/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Tata Laksana Penerbitan Administrasi STNK/TNKB Rahasia dan STNK/TNKB Khusus bagi kendaraan bermotor dinas TNI/Polri dan Instansi Sipil tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

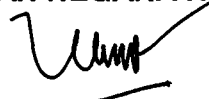
Pasal 24

Peraturan Kapolri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/136/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Tata Laksana Penerbitan Administrasi STNK/TNKB Rahasia dan STNK/TNKB Khusus bagi kendaraan bermotor dinas TNI/Polri dan Instansi Sipil tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Kapolri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**


AMIR SYAMSUDIN

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/136/I/2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang Tata Laksana Penerbitan Administrasi STNK/TNKB Rahasia dan STNK/TNKB Khusus bagi kendaraan bermotor dinas TNI/Polri dan Instansi Sipil tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Kapolri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS**

DAFTAR LAMPIRAN

- I. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS
- II. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB RAHASIA
- III. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS
- IV. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB RAHASIA

I. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS

A. TINGKAT MABES POLRI

| NO | PEJABAT | PANGKAT | ESELONISASI |
|-----|-----------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | KAPOLRI | JENDERAL | |
| 2. | WAKAPOLRI | KOMJEN | |
| 3. | IRWASUM POLRI | KOMJEN | I A |
| 4. | WAIWASUM POLRI | IRJEN | I B |
| 5. | KARENMIN ITWASUM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 6. | IRWIL I ITWASUM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 7. | IRWIL II ITWASUM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 8. | IRWIL III ITWASUM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 9. | IRWIL IV ITWASUM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 10. | IRWIL V ITWASUM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 11. | ASOPS KAPOLRI | IRJEN | I A |
| 12. | KAROJIANSTRA SOPS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 13. | KAROBINOPS SOPS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 14. | KAROKERMA KL SOPS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 15. | KARODALOPS SOPS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 16. | ASRENA KAPOLRI | IRJEN | I A |
| 17. | KAROJAKSTRA SRENA POLRI | BRIGJEN | II A |
| 18. | KAROLEMTALA SRENA POLRI | BRIGJEN | II A |
| 19. | KAROJEMENGAR SRENA POLRI | BRIGJEN | II A |
| 20. | KARO RBP SRENA POLRI | BRIGJEN | II A |
| 21. | AS SDM KAPOLRI | IRJEN | I A |
| 22. | KAROJIANSTRA SSDM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 23. | KARODALPERS SSDM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 24. | KAROBINKAR SSDM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 25. | KAROWATPERS SSDM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 26. | KAROPSI SSDM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 27. | ASSARPRAS KAPOLRI | IRJEN | I A |
| 28. | KAROJIANSTRA SSARPRAS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 29. | KAROBEKUM SSARPRAS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 30. | KAROPAL SSARPRAS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 31. | KAROFASKON SSARPRAS POLRI | BRIGJEN | II A |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------------------------------|---------|-------|
| 32. | KADIVPROPAM POLRI | IRJEN | I B |
| 33. | KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 34. | SESROPAMINAL DIVPROPAM POLRI | KBP | II B |
| 35. | KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 36. | SESROPROVOS DIVPROPAM POLRI | KBP | II B |
| 37. | KAROWABPROF DIVPROPAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 38. | SESROWABPROF DIVPROPAM POLRI | KBP | II B |
| 39. | KADIVKUM POLRI | IRJEN | I B |
| 40. | KAROSUNLUHKUM DIVKUM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 41. | KAROBANKUM DIVKUM POLRI | BRIGJEN | IIA |
| 42. | KADIVHUMAS POLRI | IRJEN | I B |
| 43. | KAROPENMAS DIVHUMAS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 44. | KARO PID DIVHUMAS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 45. | KADIVHUBINTER POLRI | IRJEN | I B |
| 46. | SES NCB INTERPOL INDONESIA | BRIGJEN | II A |
| 47. | KAROMISINTER DIVHUBINTER POLRI | BRIGJEN | II A |
| 48. | KADIV TI POLRI | IRJEN | I B |
| 49. | KAROTEKKOM DIV TI POLRI | BRIGJEN | II A |
| 50. | KAROTEKINFO DIV TI POLRI | BRIGJEN | II A |
| 51. | SAHLI KAPOLRI BIDANG JEMEN | IRJEN | I B |
| 52. | SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSPOL | IRJEN | I B |
| 53. | SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSEK | IRJEN | I B |
| 54. | SAHLI KAPOLRI BIDANG SOSBUD | IRJEN | I B |
| 55. | SAHLI KAPOLRI BIDANG KAM | IRJEN | I B |
| 56. | KOORSPRIPIM POLRI | KBP | II A |
| 57. | KASUBBAGBUNGKOL SPRIPIM POLRI | AKBP | III A |
| 58. | KASETUM POLRI | KBP | II B |
| 59. | WAKASETUM POLRI | AKBP | III A |
| 60. | KAYANMA POLRI | KBP | II B |
| 61. | WAKAYANMA POLRI | AKBP | III A |
| 62. | KALEMDIKPOL | KOMJEN | I A |
| 63. | KARORENMIN LEMDIKPOL | BRIGJEN | II A |
| 64. | KAROJIANBANG LEMDIKPOL | BRIGJEN | II A |
| 65. | KAROBINDIKLAT LEMDIKPOL | BRIGJEN | II A |
| 66. | KAROKURLUM LEMDIKPOL | BRIGJEN | II A |
| 67. | KASESPIM POLRI | IRJEN | I B |
| 68. | SESLEM SESPIM POLRI | KBP | II A |
| 69. | KASESPIMTI POLRI | BRIGJEN | II A |

70. KASESPIMMEN.....

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|------------------------------|---------|-------|
| 70. | KASESPIMMEN POLRI | BRIGJEN | II A |
| 71. | KASESPIMMA POLRI | BRIGJEN | II A |
| 72. | KETUA STIK | IRJEN | I B |
| 73. | WAKETBIDAKADEMIK STIK | BRIGJEN | II A |
| 74. | WAKETBIDMINWA STIK | KBP | II A |
| 75. | WAKET BID PPITK STIK | KBP | II A |
| 76. | WAKETBINKERMADIANMAS STIK | KBP | II A |
| 77. | DIRPROGSARJANA STIK | BRIGJEN | II A |
| 78. | DIRPROGPASCASARJANA STIK | BRIGJEN | II A |
| 79. | GUBERNUR AKPOL | IRJEN | I B |
| 80. | WAGUBAKPOL | BRIGJEN | II A |
| 81. | DIRAKADEMIK AKPOL | KBP | II A |
| 82. | DIRBINTARLAT AKPOL | KBP | II B |
| 83. | KASETUKPA POLRI | BRIGJEN | II A |
| 84. | WAKASETUKPA POLRI | KBP | II B |
| 85. | KADIKLATSUSJATRANS LEMDIKPOL | BRIGJEN | II A |
| 86. | KASEPOLWAN LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 87. | WAKASEPOLWAN LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 88. | KASEBASA LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 89. | WAKASEBASA LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 90. | KAPUSDIKMIN LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 91. | WAKAPUSDIKMIN LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 92. | KAPUSDIKINTEL LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 93. | WAKAPUSDIKINTEL LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 94. | KAPUSDIKRESKRIM LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 95. | WAKAPUSDIKRESKRIM LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 96. | KAPUSDIKLANTAS LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 97. | WAKAPUSDIKLANTAS LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 98. | KAPUSDIKGASUM LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 99. | WAKAPUSDIKGASUM LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 100. | KAPUSDIKBRIMOB LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 101. | WAKAPUSDIKBRIMOB LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 102. | KAPUSDIKPOLAIR LEMDIKPOL | KBP | II B |
| 103. | WAKAPUSDIKPOLAIR LEMDIKPOL | AKBP | III A |
| 104. | KAPUSLITBANG POLRI | BRIGJEN | II A |
| 105. | SESPUSLITBANG POLRI | KBP | II B |
| 106. | KAPUSKEU POLRI | BRIGJEN | II A |
| 107. | SESPUSKEU POLRI | KBP | II B |

108. KABIDKEU.....

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------------------------------|---------|------|
| 108. | KABIDKEU PUSKEU POLRI | KBP | II B |
| 109. | KAPUSDOKKES POLRI | BRIGJEN | II A |
| 110. | SESPUSDOKKES POLRI | KBP | II B |
| 111. | KARUMKIT BHAYANGKARA TK I POLRI | BRIGJEN | II A |
| 112. | WAKARUMKIT BHAYANGKARA TK I POLRI | KBP | II B |
| 113. | KAPUSJARAH POLRI | BRIGJEN | II A |
| 114. | SESPUSJARAH POLRI | KBP | II B |
| 115. | KABAINTELKAM POLRI | KOMJEN | I A |
| 116. | WAKABAINTELKAM POLRI | IRJEN | I B |
| 117. | KAROANALIS BAINTELKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 118. | KARORENMIN BAINTELKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 119. | DIREKTUR POLITIK BAINTELKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 120. | WADIRPOLITIK BAINTELKAM POLRI | KBP | II B |
| 121. | DIREKTUR EKONOMI BAINTELKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 122. | WADIREKONOMI BAINTELKAM POLRI | KBP | II B |
| 123. | DIREKTUR SOSBUD BAINTELKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 124. | WADIRSOSBUD BAINTELKAM POLRI | KBP | II B |
| 125. | DIREKTUR KAMNEG BAINTELKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 126. | WADIRKAMNEG BAINTELKAM POLRI | KBP | II B |
| 127. | KABAHARKAM POLRI | KOMJEN | I A |
| 128. | WAKABAHARKAM POLRI | IRJEN | I B |
| 129. | KARORENMIN BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 130. | KAROBINOPSNAL BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 131. | DIRBINMAS BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 132. | WADIRBINMAS BAHARKAM POLRI | KBP | II B |
| 133. | DIRSABHARA BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 134. | WADIRSABHARA BAHARKAM POLRI | KBP | II B |
| 135. | DIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 136. | WADIRPAMOBVIT BAHARKAM POLRI | KBP | II B |
| 137. | DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 138. | WADIRPOLAIR BAHARKAM POLRI | KBP | II B |
| 139. | DIRPOLUDARA BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 140. | WADIRPOLUDARA BAHARKAM POLRI | KBP | II B |
| 141. | DIRPOLSATWA BAHARKAM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 142. | WADIRPOLSATWA BAHARKAM POLRI | KBP | II B |
| 143. | KABARESKRIM POLRI | KOMJEN | I A |
| 144. | WAKABARESKRIM POLRI | IRJEN | I B |
| 145. | KAROWASSIDIK BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |

146. KAROBINOPSNAL.....

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---------|------|
| 146. | KAROBINOPSNAL BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 147. | KARORENMIN BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 148. | KAROKORWAS PPNS BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 149. | DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 150. | WADIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 151. | DIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 152. | WADIRTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 153. | DIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 154. | WADIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 155. | DIRTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 156. | WADIRTIPIDNARKOBA BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 157. | DIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 158. | WADIRTIPIDTER BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 159. | KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 160. | SESPUSLABFOR BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 161. | KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 162. | SESPUSIKNAS BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 163. | KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI | BRIGJEN | II A |
| 164. | SESPUSINAFIS BARESKRIM POLRI | KBP | II B |
| 165. | KAKORLANTAS POLRI | IRJEN | I B |
| 166. | WAKAKORLANTAS POLRI | BRIGJEN | II A |
| 167. | KAKORBRIMOB POLRI | IRJEN | I B |
| 168. | WAKAKORBRIMOB POLRI | BRIGJEN | II A |
| 169. | KADENSUS 88 AT POLRI | BRIGJEN | II A |
| 170. | WAKADENSUS 88 AT POLRI | KBP | II B |
| 171. | MANTAN KAPOLRI | | |
| 172. | PENASIHAT AHLI KAPOLRI | | |
| 173. | PERWIRA YANG DITUGASKAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN | | |

B. TINGKAT.....

B. TINGKAT POLDA

| NO | PEJABAT | PANGKAT | ESELONISASI |
|-----|---------------|-------------------|--------------|
| 1. | KAPOLDA | IRJEN/ BRIGJEN | I B |
| 2. | WAKAPOLDA | BRIGJEN/ KBP | II A |
| 3. | IRWASDA | KBP | II B |
| 4. | KAROOPS | KBP | II B |
| 5. | KARORENA | KBP | II B |
| 6. | KARO SDM | KBP | II B |
| 7. | KAROSARPRAS | KBP | II B |
| 8. | KABIDPROPAM | KBP / AKBP | II B / III A |
| 9. | KABIDHUMAS | KBP / AKBP | II B / III A |
| 10. | KABIDKUM | KBP / AKBP | II B / III A |
| 11. | KABID TI | KBP / AKBP | II B / III A |
| 12. | KOORSPRIPIM | AKBP | III A |
| 13. | KASETUM | AKBP | III A |
| 14. | KAYANMA | AKBP | III A |
| 15. | DIRINTELKAM | KBP | II B |
| 16. | DIRRESKRIMUM | KBP | II B |
| 17. | DIRRESKRIMSUS | KBP | II B |
| 18. | DIRRESNARKOBA | KBP | II B |
| 19. | DIRBINMAS | KBP | II B |
| 20. | DIRSABHARA | KBP | II B |
| 21. | DIRLANTAS | KBP | II B |
| 22. | DIRPAMOBVIT | KBP | II B |
| 23. | DIRPOLAIR | KBP | II B |
| 24. | DIRTAHTI | AKBP | III A |
| 25. | KASATBRIMOB | KBP | II B |
| 26. | KABIDKEU | KBP | II B |
| 27. | KABIDDOKKES | KBP | II B |
| 28. | KA SPN | KBP | II B |

C. TINGKAT POLRES

| NO | PEJABAT | PANGKAT | ESELONISASI |
|----|--|-----------------|--------------|
| 1 | KAPOLRESTRO/KAPOLRETABES/ KAPOLRES/KAPOLRESTA | KBP/AKBP | II B / III A |
| 2 | WAKAPOLRESTRO/WAKAPOLRETABES/ WAKAPOLRES/WAKAPOLRESTA | AKBP/ KOMPOL | II B / III A |

II. DAFTAR.....

II. DAFTAR PEJABAT DI LINGKUNGAN POLRI YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB RAHASIA

| NO | PEJABAT |
|----|--|
| | |
| 1. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI INTELIJEN |
| 2. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI RESKRIMUM |
| 3. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI RESKRIMSUS |
| 4. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI RESNARKOBA |
| 5. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI DENSUS 88 AT POLRI |
| 6. | PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL FUNGSI PAMINAL |

III. DAFTAR.....

V. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS

A. TINGKAT PUSAT

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|------------------------------|--|---|
| 1. | Kementrian | a. Menteri b. Sekjen c. Dirjen | |
| 2. | DPR RI | a. Ketua DPR RI b. Para Wakil Ketua c. Para Ketua Komisi/Fraksi | Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional) |
| 3. | Markas Besar TNI | a. Panglima TNI b. Kasum c. Kepala Staf Angkatan d. Asisten Intel TNI | |
| 4. | Kejaksaan Agung | a. Jaksa Agung b. Wakil Jaksa Agung c. JAM Intelijen | |
| 5. | Badan Intelijen Negara | a. Kepala BIN b. Para Deputi BIN | |
| 6. | Komisi Pemberantasan Korupsi | a. Ketua KPK b. Para Direktur | |
| 7. | Badan Narkotika Nasional | a. Kepala BNN b. Para Direktur BNN | |

B. TINGKAT.....

B. TINGKAT PROVINSI

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|------------------------------|--|---|
| 1. | Pemerintah Provinsi | a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Sekertaris Daerah d. Para Asisten e. Kadis/Kepala Badan | Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional) |
| 2. | Kodam/Satuan setingkat Kodam | a. Panglima Kodam/AL/AU b. Kasdam c. Asisten Intelijen Kodam | |
| 3. | Kejaksaan Tinggi | a. Kajati b. Kasiintel Kejaksaan Tinggi | |
| 4. | Pengadilan Tinggi | Ketua Pengadilan | |
| 5. | DPRD Provinsi | a. Ketua DPRD Provinsi b. Para Wakil Ketua c. Para Ketua Komisi | Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional) |
| 6. | Korem/Satuan setingkat Korem | a. Danrem/Dan Lanal/Dan Lanud b. Kasiintel | |
| 7. | Badan Narkotika Propinsi | Kepala BNP | |
| 8. | Pos BIN Wilayah | Kaposwil BIN Provinsi | |

C. TINGKAT.....

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|--------------------------------|--|---|
| 1. | Pemerintah Daerah | a. Bupati/Walikota b. Wakil Bupati/Wakil Walikota c. Sekretaris Daerah d. Para Asisten e. Kadis/Kepala Badan | Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional) |
| 2. | Kodim/Satuan setingkat Kodim | a. Dandim b. Kasiintel Kodim | |
| 3. | Kejaksaan Negeri | a. Kepala Kejaksaan Negeri b. Kasiintel Kajari | |
| 4. | Pengadilan Negeri | Ketua Pengadilan | |
| 5. | DPRD Kabupaten | a. Ketua DPRD Kabupaten/Kota b. Para Wakil Ketua c. Para Ketua Komisi/Fraksi | Dapat diberikan pada waktu situasi tertentu (situasional) |
| 6. | Badan Narkotika Kabupaten/Kota | Kepala BNK | |

VI. DAFTAR PEJABAT DARI TNI DAN INSTANSI PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI STNK/TNKB KHUSUS

A. TINGKAT PUSAT

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|------------------------------|--|--------------------|
| 1. | Markas Besar TNI | Personel Intelijen TNI sesuai dengan Kep Jabatan | |
| 2. | Kejaksaan Agung | Jaksa Penyelidik/Penyidik | |
| 3. | Komisi Pemberantasan Korupsi | Penyelidik/Penyidik KPK | Sesuai Kep Jabatan |
| 4. | Badan Narkotika Nasional | Personel Penyelidik/Penyidik BNN | Sesuai Kep Jabatan |
| 5. | BIN | Personel Penyelidik BIN | Sesuai Kep Jabatan |

B. TINGKAT PROVINSI

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|--------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | Kejaksaan Tinggi | Jaksa Penyelidik/Penyidik | |
| 2. | Badan Narkotika Propinsi | Personel Penyelidik BNP | Sesuai Kep Jabatan |
| 3. | Badan Intelijen Negara | Personel Penyelidik Poswil BIN | Sesuai Kep Jabatan |

C. TINGKAT.....

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | Kejaksaan Negeri | Jaksa Penyelidik/Penyidik | Sesuai Kep Jabatan |
| 2. | Badan Narkotika Kabupaten/Kota | Personel Penyelidik BNK | Sesuai Kep Jabatan |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Kejaksaan Negeri | Jaksa Penyelidik/Pyenyidik | Sesuai Kep Jabatan |
| 2. | Badan Narkotika Kabupaten/Kota | Personel Penyelidik BNK | Sesuai Kep Jabatan |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



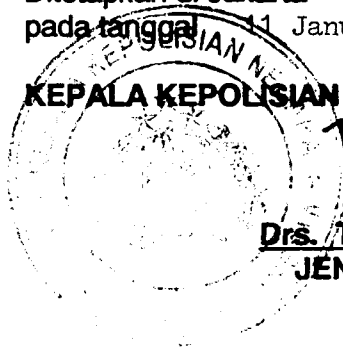
Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

| NO. | INSTANSI | PEJABAT | KET |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Kejaksaan Negeri | Jaksa Penyelidik/Penyidik | Sesuai Kep Jabatan |
| 2. | Badan Narkotika Kabupaten/Kota | Personel Penyelidik BNK | Sesuai Kep Jabatan |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Timur Prado
Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI